

RAFFLESIA

Vol. 17 No. 1, Januari 2011

DAFTAR ISI

Pengaruh Dosis Pupuk Kalium dan Pupuk Nitrogen Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Padi Manis (<i>Zea mays saccharata</i> Sturt) (Nila Suryati)	307
Produktivitas Seresah <i>Sonneratia alba</i> Sm di Hutan Mangrove Pulau Baai Bengkulu (Efratenta Katherina Depari)	312
Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet Pada Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas (Suharto Patih)	317
Respon Kompos Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kacang Tanah (<i>Arachis hypogaea</i> L.) Pada Tanah Eks Tambang Timah (Burlian Hasani)	322
Respon Pertumbuhan Semai Jati Putih (<i>Gmelia arborea</i> Roxb.) Terhadap Perbedaan Komposisi Media Tanam (Sebuk Gergaji, Sekam Padi, Subsoil Ultisol) (Deselina)	330
Pembuatan Serbuk Kering dari Infus Daun Waru (<i>Hibiscus tikiaceus</i> L.) Dengan Metode Adsorben (Nova Prishellya)	336
Faktor - Faktor Yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Afinitas Terhadap Program Desa Mandiri Pangan di Desa Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara (Basuki Sigit Priyono, Agus Purwoko dan Eva Junita Manihuruk)	343
Pengaruh Penggunaan Pasir Dalam Ransum Terhadap Persentase Potongan Komersial Karkas dan Organ Bagian Dalam Ayam Broiler (Betty Herlina)	350
Respon Bibit Tanaman Karet (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg) Payung Kedua Terhadap Dosis Pupuk Nitrogen dan Posfat (Sugito Loso)	355
Hubungan Jumlah Konidia di Udara dengan Keparahan Penyakit Gugur daun Colletotrichum Pada Lima Klon Karet Eksperimental di BPP Sembawa (Nurhayati, Nirwati Anwar, Abdul Mazid dan Masayu Elsa Lina)	361
Sejarah Perkembangan dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Yang Tinggal di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Badas di Kabupaten (Siswahyono)	366
Pengaruh Jarak Tanam dan Mulsa Jerami Padi Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kacang Hijau (<i>Vigna radiata</i>) (Sutejo)	379
Uji Delapan Isolat Fungi Penginduksi Resin Terhadap Pembentukan Gubal Gaharu Pohon <i>Aquileiria malaccensis</i> Lamk (Guswani Anwar)	386



RAFFLESIA

MENGESAHKAN
Salinan Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal: Kabag Tata Usaha

Vol. 17 No. 1, Januari 2011

DAFTAR ISI

Pengaruh Dosis Pupuk Kalium dan Pupuk Nitrogen Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Jagung Manis (<i>Zea mays saccharata</i> Sturt) (Nila Suryati)	307
Produktivitas Seresah <i>Sonneratia alba</i> Sm di Hutan Mangrove Pulau Baai Bengkulu (Efratenta Katherina Depari).....	312
Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet Pada Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas (Suharto Patih).....	317
Respon Kompos Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kacang Tanah (<i>Arachis hypogaea</i> L.) Pada Tanah Eks Tambang Timah (Burlian Hasani)	322
Respon Pertumbuhan Semai Jati Putih (<i>Gmelia arborea</i> Roxb.) Terhadap Perbedaan Komposisi Media Tanam (Sebuk Gergaji, Sekam Padi, Subsoil Ultisol) (Deselina).....	330
Pembuatan Serbuk Kering dari Infus Daun Waru (<i>Hibiscus tikiaceus</i> L.) Dengan Metode Adsorben (Nova Prishellya)	336
Faktor – Faktor Yang Berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Afinitas Terhadap Program Desa Mandiri Pangan di Desa Mulya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara (Basuki Sigit Priyono, Agus Purwoko dan Eva Junita Manihuruk).....	343
Pengaruh Penggunaan Pasir Dalam Ransum Terhadap Persentase Potongan Komersial Karkas dan Organ Bagian Dalam Ayam Broiler (Betty Herlina)	350
Respon Bibit Tanaman Karet (<i>Hevea brasiliensis</i> Muell. Arg) Payung Kedua Terhadap Dosis Pupuk Nitrogen dan Posfat (Sugito Loso)	355
Hubungan Jumlah Konidia di Udara dengan Keparahan Penyakit Gugur daun Colletotrichum Pada Lima Klon Karet Ekperimental di BPP Sembawa (Nurhayati, Nirwati Anwar, Abdul Mazid dan Masayu Elsa Lina).....	361
Sejarah Perkembangan dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Yang Tinggal di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Badas di Kabupaten (Siswahyono)	366
Pengaruh Jarak Tanam dan Mulsa Jerami Padi Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kacang Hijau (<i>Vigna radiata</i>) (Sutejo)	379
Uji Delapan Isolat Fungi Penginduksi Resin Terhadap Pembentukan Gubal Gaharu Pohon <i>Aquillaria malaccensis</i> Lamk (Guswani Anwar)	386



LEMBAGA PENERBITAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

ISSN : 1411 – 2434

Jurnal Penelitian

RAFFLESIA

Jurnal penelitian Rafflesia merupakan jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Bengkulu, diterbitkan sebagai media publikasi hasil penelitian dan kajian ilmu – ilmu pertanian.

Redaksi mengharapkan kepada para penulis untuk ambil bagian dalam mengisi jurnal ini. Tulisan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis pada tiga tahun terakhir

Redaksi berhak menyunting tulisan yang akan dimuat pada tim penyunting tanpa mengubah arti dari tulisan tersebut.

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab :
Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Redaksi
Ir. Ririn Harini, M.P.

Redaksi Pelaksana
Dr. Ir. Sunaryadi, M.Si.
Ir. Suryadi, M.P.
Dwi Fitriani, S.P., M.P.
Anton Feriady, S.P.

Penyunting
Dr. Ir. Nurhaita, M.P.
Dr. Ir. Hasanawi, M.P.

Alamat Redaksi :
Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
PO. BOX 118 Telp. (0736) 22765 Bengkulu 38119

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA YANG TINGGAL DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) BUKIT BADAS DI KABUPATEN SELUMA

Oleh :

Siswahyono

(Staf Pengajar Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu)

ABSTRAK

Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) Bukit Badas merupakan salah satu kawasan hutan produksi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan. Sebelum dilakukan penunjukan sebagai kawasan hutan, diduga masyarakat telah bertempat tinggal menetap di dalam kawasan hutan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah perkembangan desa/dusun dalam kawasan HPT Bukit Badas dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Data sejarah perkembangan desa dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat di dalam kawasan sangat penting diketahui untuk merumuskan kebijaksanaan yang tepat dalam mengelola kawasan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan desa-desa yang terdapat dalam kawasan HPT Bukit Badas telah ada sejak jaman pemerintahan Belanda. Awalnya desa tersebut berupa "talang" yang merupakan permukiman mengelompok beberapa rumah panggung dan berkembang menjadi sebuah desa seiring bertambahnya jumlah penduduk. Umumnya masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan rata-rata memiliki lahan usaha tani yang mampu digarap seluas 1,62 Ha/KK yang berupa sawah 0,42 Ha/KK dan kebun kopi 1,2 Ha/KK. Pemilikan lahan yang luas tersebut belum diimbangi dengan produktivitas lahannya yang masih tergolong rendah, yaitu 394,23 Kg/Ha/tahun untuk lahan kebun kopi dan 1.045,75 kg/ha/musim atau 2.091,5 Kg/Ha/Tahun untuk lahan sawah. Produktivitas lahan yang rendah bermuara pada penghasilan yang cenderung rendah juga sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan.

Kata kunci : sejarah desa, HPT Bukit Badas, karakteristik sosial ekonomi masyarakat

PENDAHULUAN

Sumber daya hutan merupakan salah satu sumber daya yang memegang peranan penting dalam mendukung pemenuhan berbagai kebutuhan manusia mulai dari jaman berburu meramu hingga saat sekarang yang dipandang sebagai pertanian modern. Hingga beberapa dekade, sumber daya hutan juga merupakan pemasok devisa terbesar kedua setelah migas bagi Pemerintah Indonesia. Melalui Departemen Kehutanan, Pemerintah Indonesia menguasai dan mengelola sumber daya hutan yang ada di seluruh Indonesia.

Proses penguasaan dan pengelolaan hutan oleh Negara, diawali oleh kegiatan penunjukan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, dilanjutkan dengan penataan tata batas hutan, pemetaan dan penetapan. Demikian juga dengan proses pengukuhan kawasan hutan di wilayah Kecamatan Seluma Utara menjadi HPT Bukit Badas hingga saat ini. Penunjukan kawasan HPT Bukit Badas telah dilakukan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan SK MENHUT No. 383/Kpts-II/1985 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, dan dalam perkembangannya ditindaklanjuti SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No.305 Tahun 1998 tentang Hasil

Raduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan SK MENHUT No. 420/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Bengkulu seluas 1964 Ha.

Proses penetapan kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap, seringkali mengabaikan keberadaan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan sebelumnya, meskipun dalam peraturan sangat jelas disebutkan bahwa dalam proses penetapan kawasan hutan harus bebas dari hak-hak pihak ketiga seperti yang tertuang dalam SK MENHUT No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. Dijelaskan dalam SK tersebut kriteria batas areal yang ditata batas (tahapan proses penetapan kawasan hutan) sebagai kawasan hutan anatara lain adalah bebas dari hak-hak pihak ketiga dan memperoleh pengakuan para pihak (masyarakat, badan hukum dan pemerintah) di sepanjang trayek penataan batas. Namun dalam kenyataannya hak-hak masyarakat yang secara turun temurun telah hidup dalam areal tertentu, harus dihadapkan dengan pihak lain sebagai pemegang hak kelola hutan yang ditunjuk dan diberikan oleh pemerintah. Kondisi ini banyak terjadi hampir semua kawasan hutan di Indonesia (Hendarti, *et al*, 2009).

Pada Pasal 7 SK MENHUT No.399/Kpts-II/1990 disebutkan bahwa penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang timbul dalam penentuan trayek batas sementara dilakukan berdasarkan petunjuk Menteri kehutanan. Lebih lanjut Pasal 12 ayat 1) disebutkan bahwa berita acara pengumuman trayek batas ditanda-tangani oleh lurah/kepala desa....dst. Berdasarkan SK MENHUT ini seharusnya masyarakat mengetahui informasi terkait penataan batas atas lahan yang ditunjuk dan akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga apabila lahan usaha tani yang dimiliki masyarakat masuk trayek batas dapat mengajukan keberatan. Dengan demikian konflik atas batas kawasan hutan yang diakibatkan oleh

kegiatan pengukuhan hutan dapat diminimalkan dikemudian harinya.

Penunjukkan kawasan HPT Bukit Badas akhirnya melahirkan konflik penggunaan lahan, terutama ketidakpastian masyarakat yang secara turun temurun telah menguasai dan mengelola lahan dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat merasa bahwa lahan yang telah mereka kuasai bukanlah kawasan hutan, tetapi lahan adat yang telah dikelola para *tuo-tuonya* (pendahulunya) dan mereka tidak mengetahui kalau lahan mereka telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah. Dilain pihak, sejak penunjukannya, kawasan HPT Bukit Badas belum pernah dilakukan pengelolaan di tingkat tapak oleh Pemerintah sendiri maupun pemegang ijin konsesi. Pada tahun 1998, kawasan HPT Bukit Badas pernah direncanakan akan dijadikan pilot project Hutan Kemasyarakatan (HKm) bantuan OECF, tetapi masyarakat melakukan penolakan, sehingga kegiatan tersebut dialihkan ke kawasan hutan yang lain di Propinsi Bengkulu.

Penelitian ini merupakan penelitian awal guna mengungkap sejarah perkembangan desa-desa di dalam kawasan HPT Bukit Badas dan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan tersebut. Dengan mengetahui sejarah perkembangan desa dan karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah terutama Departemen Kehutanan dalam merumuskan kebijakan di dalam HPT Bukit Badas, maupun kepada peneliti lainnya terkait dengan keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam serta di Dusun Sinar Pagi dan Dusun Talang Empat, yang merupakan desa/dusun di dalam kawasan HPT Bukit Badas. Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak merupakan desa

definitive, sedangkan Dusun Sinar Pagi dan Dusun Talang Empat merupakan bagian dari Desa Puguk, tetapi dalam proses pemekaran desa. Responden hanya diambil dari Desa Lubuk Resam dengan intensitas 10% dari jumlah Kepala Keluarga (KK) di desa tersebut. Penentuan responden dilakukan dengan *accidental sampling*, dan merupakan KK yang memiliki rumah dan bertempat tinggal di Desa Lubuk Resam.

Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung (*observation*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentation*). Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kawasan HPT Bukit Badas

Sebagai kawasan hutan produksi terbatas, seharusnya HPT Bukit Badas berfungsi sebagai penghasil hutan, baik kayu maupun non kayu (getah, buah, rotan dan lainnya). Namun fungsi tersebut tidak terwujud, mengingat dari awal belum menunjukkan hingga sekarang belum pernah dilakukan pengelolaan baik oleh pemerintah sendiri maupun badan hukum yang memegang ijin. Kawasan hutan yang relatif sempit (hanya 9.044,42 Ha) dan dengan tegakan tersedia (*standing stock*) yang rendah kurang menarik bagi investor untuk mengajukan ijin konsesi HPT Bukit Badas disamping tumpang tindihnya kawasan hutan dengan lahan masyarakat.

Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit yang dilakukan oleh BIPHUT (2008), kondisi penutupan lahan dalam kawasan HPT Bukit Badas adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penutupan Lahan Kawasan HPT Bukit Badas

No.	Tipe Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Belukar muda	24,17	0,27
2	Belukar muda dan karet	22,19	0,25
3	Belukar muda dan kebun campur	1.213,15	13,4
4	Belukar tua	1.028,14	11,4
5	Hutan	90,96	1,0
6	Kebun masyarakat	36,28	0,4
7	Kebun campur	2.756,25	30,5
8	Ladang	2.463,22	27,3
9	Lahan terbuka	70,68	0,78
10	Pemukiman	56,53	0,62
11	Perkebunan karet	246,77	2,7
12	Sawah	126,36	1,4
13	Sawit masyarakat	702,12	9,7
14	Tambang batubara	33,36	0,37
15	Sawah masyarakat	174,34	1,93
Jumlah		9.044,42	100

Sumber : Anonim, 2008

Berdasarkan tabel di atas, kawasan HPT Bukit Badas didominasi oleh penutupan lahan kebun campur dan ladang, sedangkan penutupan hutan hanya sebesar 90,96 ha atau 1,0%. Hal ini menunjukkan bahwa lahan

dalam kawasan HPT Bukit Badas sebagian besar sudah dikelola oleh masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya. Penutupan lahan berupa hutan hanya 90,96 Ha atau 1%.

Di HPT Bukit Badas Kabupaten Seluma terdapat sekitar 2 desa definitif yang berada di dalam kawasan hutan yaitu Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam serta beberapa dusun yang masih termasuk dalam wilayah Desa Puguk yaitu Dusun Sinar Pagi, Dusun Talang Empat dan Dusun palaijang. Desa-desanya sekitar kawasan hutan antara lain Desa Puguk, Desa Selingsingan, Desa Pandan dan Desa Talang beringin.

Sejarah Desa/Dusun Dalam Kawasan HPT Bukit Badas

Desa/dusun yang terdapat di dalam kawasan sekitar HPT Bukit Badas masuk dalam wilayah pemerintahan Marga Seloema pada zaman Pemerintahan Belanda (tahun 1837 sampai 1942), yang meliputi Desa Pandan, Desa Pogo (Puguk), Desa Tanjung Bunga dan Desa Pandjong Seroe (*Generalle Zamen Trekking Dienstjaar 1845 dalam Dali, 2008*). Desa Lubuk Resam dan Desa Sekalak awalnya merupakan bagian dari Marga Pogo (Desa Puguk).

Sebutan "Marga" disini bukan masyarakat berdasarkan keturunan (*geneologis*), tetapi masyarakat hukum adat yang didasarkan pada letak wilayah (*territorial*). Pemerintahan Belanda membagi wilayah Kabupaten Seluma menjadi beberapa marga antara lain : marga 5 Boeah-bada, Marga Andalas Sungai Keruh, Marga Angalam Kongkei/Sindoer, Marga Seloema, Marga Semidang Bunga Emas, Marga Anak Angie, Marga Talo, Marga Penago, Marga Kuto Padang, Marga Anak Marigo dan lainnya. Masykuri *et al* (1990) menyebutkan ada 55 marga di wilayah Propinsi Bengkulu.

Berdasarkan sejarah *tuo-tuo* (orang yang telah berusia lanjut dan dihormati oleh masyarakat setempat sebagai pendiri desa atau ketua adat atau mantan pejabat saat pemerintahan marga), bahwa pada jaman pemerintahan Belanda hutan dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. *Gimbo Larangan* yaitu hutan yang dibatasi dengan patok Bosweizen

atau dikenal dengan patok BW. Wilayah gimbo larangan ditetapkan sebagai hutan Negara dan saat ini bernama hutan lindung Bukit Sanggul.

2. Hutan Margo atau tanah margo yaitu hutan yang diperuntukkan untuk diolah masyarakat marga guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Letaknya dibawah patok BW hingga ke tanah pesisir dan pada tahun 1985 sebagian sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Bukit Badas.
3. Tanah pesisir yaitu tanah yang terletak dari hutan marga sampai wilayah laut.

Berdasarkan penuturan para *tuo-tuo* tersebut, bahwa masyarakat marga menghargai batas-batas BW tersebut hingga turun temurunnya saat ini. Hal ini terjadi karena sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda dipandang tegas dan berat. Dipihak lain tanah marga masih luas untuk bercocok tanam.

Sejarah pengelolaan hutan di luar Jawa diawali oleh terbitnya *Agrarische Reglement* yang berlaku untuk wilayah Sumatera Barat, Menado, Riau dan pulau-pulau dalam lingkungannya masing-masing, Bangka dan Belitung, Palembang, Jambi dan Bengkulu. Di daerah-daerah tersebut setiap pemungutan hasil hutan pada umumnya memerlukan ijin dari pamong praja (Nurjaya, 2005). Merujuk sejarah di Lampung Barat, Verbist dan Pasya (2005) menyatakan, Pemerintah Belanda sangat tertarik pada penggunaan struktur dan institusi tradisional untuk alasan lain, yaitu pengumpulan pajak. Departemen Kehutanan Belanda (*Boschwezen*) bekerjasama dengan elite Suku Lampung untuk mendapatkan pajak dari orang yang membuka lahan.

Gimbo larangan yang telah dipatok BW tersebut sekarang ini dijadikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai kawasan hutan lindung Bukit Sanggul, dan umumnya masyarakat sekitar hutan lindung Bukit Sanggul tidak merambah atau membuka

lahan dalam kawasan hutan lindung tersebut. Berdasarkan wawancara dengan para responden, perambahan dalam kawasan hutan lindung Bukit Sanggul dilakukan oleh para pendatang yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan, atau dari Propinsi Sumatera Selatan dan bahkan ada juga dari Propinsi Lampung. Hal yang sama juga dilaporkan Dali (2008).

Desa Lubuk Resam, Desa Sekalak, Dusun Sinar Pagi, Dusun Talang Empat dan Dusun Palaijang merupakan desa/dusun yang berada di dalam kawasan HPT Bukit Badas. Desa/dusun tersebut umumnya merupakan pemukiman lama yang telah ada sejak jaman Belanda. Lokasi yang jauh dari pantai, menjadikan desa-desa dalam kawasan HPT Bukit Badas merupakan tempat persembunyian dan pelarian para pejuang dari penjajahan Belanda saat itu. Mereka berasal dari desa-desa yang dekat dengan wilayah pantai seperti Talo dan Puguk.

Lokasi yang jauh dari wilayah pantai menjadikan masyarakat di wilayah Bukit Badas juga terhindar dari program tanam paksa yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda. Setiyanto (2001) menyatakan sistem tanam paksa di wilayah Bengkulu pada tahun 1933 mengharuskan setiap kepala keluarga menanam 300 batang kopi atau 250 tanaman lada atau membayar pajak £.2 hingga £.4.

Adanya budaya *bertalang* yaitu bercocok tanam yang jauh dari desa dengan membuat pondok sebagai tempat tinggal sementara saat sedang mengerjakan lahan secara berkelompok, menjadikan pelarian dan persembunyian saat jaman penjajahan Belanda juga digunakan untuk membuka

kebun untuk melangsungkan kehidupannya. Mereka membuat pondok yang berbentuk rumah panggung secara berkelompok. Kelompok pemukiman talang yang terdapat di lahan potensial untuk dibangun persawahan akan bertahan dan berkembang menjadi suatu desa. Hal ini terjadi karena kebutuhan pangan warga yang tinggal di talang dapat dipenuhi dari lahan sawah. Oleh karena itu desa/dusun dalam kawasan HPT Bukit Badas umumnya memiliki lahan persawahan yang mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi warganya.

Seperti halnya di Dusun Sinar Pagi yang terdiri dari 7 talang yaitu talang renteng ayak 1, talang renteng ayak 2, talang rimbo nebuk, talang terentang ujung rembun, talang penantian, talang sawah dan talang kering. Lahan persawahan terdapat di lokasi talang ayak 1, talang ayak 2 dan talang sawah.

Konsep budaya bertalang juga tidak lepas dari pengaruh budidaya tanaman kopi yang memerlukan lahan subur, mengingat masyarakat mengusahakan kebun kopi hanya mengandalkan kesuburan alami lahan. Ketika lahan kopi di desa asalnya dirasakan sudah tidak subur lagi (baca : produksinya rendah), maka pemilik lahan akan *mem-belukar-kan* untuk memberikan kesempatan lahan subur kembali oleh bahan organik hasil suksesi alam.

Ada beberapa tingkatan suksesi alam dalam proses pembelukaran bagi Suku Serawai yaitu *belukar mudo*, *belukar tuo* (*hutan mudo*), *hutan tuo* dan *rimbo* (Siswahyono, 2006). Karakteristik vegetasi penyusun tahapan suksesi tersebut tersaji dalam tabel berikut :

Tahapan suksesi dalam penggunaan lahan

Tingkatan Suksesi	Ciri-ciri	Keterangan
<i>Belukar mudo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - banyak alang-alang - semak perdu tingginya 5-7 m - dapat ditebas langsung dengan parang - umurnya kurang dari 10 tahun 	Paling Banyak dijumpai
<i>Belukar Tuo (Hutan Mudo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - alang-alang sudah jarang - didominasi tumbuhan berdiameter < 10 cm - penebasan dan penebangan menggunakan parang - umurnya 10-20 tahun 	Banyak dijumpai
<i>Hutan Tuo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - didominasi pohon berdiameter > 10 cm - penebasan dengan parang, tetapi penebangan menggunakan kapak/beliung - umur 20 -40 tahun 	Jarang dijumpai
<i>Rimbo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - didominasi pohon berdiameter > 10 cm - penebasan dengan parang, penebangan dengan gergaji chainsaw - umurnya > 40 tahun 	Sangat jarang

Sumber : Siswahyono, 2006

Desa Lubuk Resam terdapat “*rimbo tenam*” yang didominasi oleh pohon jenis tenam (*area sp*) yang dipelihara oleh pemiliknya yang bernama Cik Aman dan telah berumur lebih dari 50 tahun. Prediksi umur rimbo tersebut didasarkan pengakuan Cik Aman, dimana rimbo tenam tersebut merupakan warisan dari orang tuanya dan Cik Aman sendiri sekarang telah berumur lebih dari 65 tahun. Berdasarkan keberadaan rimbo tenam ini dapat menjadi sumber informasi bahwa Desa Lubuk Resam sudah lebih dari 50 tahun.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa/Kelurahan, telah menghapuskan pemerintahan marga di wilayah Kabupaten Seluma. Peran pemerintahan marga di desa digantikan oleh pemerintahan desa dengan kepala desa sebagai pemimpinnya. Pemerintahan marga yang semula memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian kawasan *gimbo larangan*, dengan berubahnya menjadi pemerintahan desa, tanggung jawab terhadap kawasan hutan tersebut tersebut menjadi

tidak ada. Pemerintah desa hanya mengurus wilayah administrasinya, tidak menjangkau kawasan gimbo larangan. Namun demikian, masyarakat desa sekitar gimbo larangan masih menghormati batas kawasan yang telah dibuat jaman Belanda tersebut dan sampai dengan saat ini mereka belum berani membuka kebun kopi dalam kawasan gimbo larangan.

Secara perlahan namun pasti, berubahnya sistem pemerintahan marga menjadi pemerintah desa, berimplikasi terhadap kelestarian kawasan gimbo larangan. Apabila pemerintahan marga berani menjatuhkan sanksi “*dendo adat*” kepada seseorang yang membuka gimbo larangan, tetapi tidak demikian dengan pemerintah desa. Hal ini diakibatkan tidak adanya delegasi kewenangan kepada desa dalam pengelolaan *gimbo larangan*.

Pada tahun 1990-an kawasan gimbo larangan mulai didatangi perambah dari berbagai daerah, seperti dari Kabupaten Bengkulu Selatan maupun dari Propinsi Sumatera Selatan. Terbukanya aksesibilitas ke *gimbo larangan* oleh jalan yang dibuat

oleh perusahaan tambang batubara menjadi salah satu penyebab berdatangnya perambah dari wilayah lain.

Masyarakat desa/dusun dalam kawasan hutan Bukit Badas sebenarnya telah menyampaikan keberatan atas penunjukkan wilayah tempat tinggalnya dijadikan sebagai hutan produksi terbatas oleh Pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh surat yang dikirim Bupati Bengkulu Selatan pada Bulan Maret 1988, yang merupakan balasan atas surat yang dikirim oleh Kepala Desa Puguk yang menyatakan Desa Puguk Kecamatan Seluma dikeluarkan dari tata batas kawasan hutan Negara atau dinyatakan sebagai *enclave*. Namun proses selanjutnya tetap menunjuk wilayah Lubuk Resam, Sekalak, Talang Empat, Sinar Pagi, Palaijang yang merupakan wilayah Desa Puguk menjadi bagian dari kawasan hutan produksi terbatas Bukit Badas. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No.305 Tahun 1998 tentang Hasil Pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan SK MENHUT No. 420/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Bengkulu seluas 920.964 Ha.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Kawasan HPT Bukit Badas

Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan yang menyertainya merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan hutan. Simon (2000) menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk akan mengurangi rasio kepemilikan lahan atau lahan garapan. Sementara pertumbuhan penduduk menuntut pertumbuhan konsumsi pangan, energi, kayu pertukangan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, selanjutnya produksi pangan lahan pertanian per satuan luasnya tidak bisa ditingkatkan, kebutuhan pangan akan dipenuhi dengan cara perluasan lahan pertanian dengan mengalihfungsikan hutan yang ada.

Masyarakat desa/dusun dalam kawasan HPT Bukit Badas merupakan masyarakat asli Suku Serawai. Lokasi desa/dusun yang awalnya terisolasi menjadikan desa/dusun dalam kawasan HPT Bukit Badas belum menjadi daya tarik bagi penduduk pendatang untuk menetap di desa/dusun tersebut. Oleh karena itu jarang dijumpai penduduk pendatang yang menetap tinggal di desa/dusun. Sebaran jumlah kepala keluarga dan penduduk di empat desa/dusun yang berada di dalam kawasan HPT Bukit Badas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga & Penduduk desa/dusun dalam HPT Bukit Badas

No.	Kriteria	Desa/Dusun			
		Sekalak	Lubuk Resam	Talang Empat*	Sinar Pagi*
1.	Jumlah KK	144	245	154	189
2	Jumlah Penduduk	613	963	520	735
3	Penduduk Laki-laki	389	525	232	463
4	Penduduk perempuan	224	438	222	272

Sumber : Profil Desa dan Hasil Wawancara, 2009

*masuk wilayah Desa Puguk

Jumlah total penduduk yang berada di empat desa/dusun di dalam kawasan HPT Bukit Badas tersebut sebanyak 2.794 jiwa (767 kk) yang terdiri dari 1622 jiwa laki-laki dan 1162 perempuan. Berdasarkan jumlah

KK dan jumlah penduduk, tiap keluarga terdiri dari kurang lebih 3 atau empat orang. Umumnya mereka bertempat tinggal dengan pola permukiman yang mengelompok rapat,

sehingga antar rumah tidak memiliki batas pagar yang jelas.

Pola permukiman yang mengelompok ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan desa/dusun yang awalnya merupakan talang. Dengan membuat rumah panggung yang saling berdekatan, masyarakat yang bertalang akan merasa aman dari berbagai gangguan. Lokasi talang yang jauh dari tempat tinggal asalnya, akan memudahkan penjagaan rumah apabila ada salah satu anggota talang yang pulang ke desa asalnya. Lokasi permukiman awalnya dipilih dekat dengan sumber air yang berupa

sungai atau anak sungai. Permukiman yang dekat dengan sumber air tersebut memudahkan untuk melakukan aktivitas MCK.

Mata pencaharian utama masyarakat desa-desa di dalam kawasan hutan adalah petani. Pekerjaan lainnya adalah pegawai negeri/guru, pedagang buruh dan wiraswasta. Data sebaran penduduk berdasarkan pekerjaan dari empat desa/dusun dalam kawasan HPT Bukit Badas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 4. Jumlah Kepala Keluarga berdasar Pekerjaan

No.	Kriteria	Desa/Dusun			
		Sekalak	Lubuk Resam	Talang Empat	Sinar Pagi
1.	Petani	119	218	145	254
2	Pedagang	3	9	6	2
3	PNS/ABRI	6	7	2	3
4	Lain-lain	16	11	1	13
Prosen Petani		82,6	88,3	91,9	93,4

Sumber : Profil Desa dan Hasil Wawancara, 2009

Jika dilihat dari prosentasi pekerjaannya hampir 90% penduduk desa dalam kawasan HPT Bukit Badas adalah petani. Bahkan sebagian besar yang berprofesi bukan sebagai petanipun juga memiliki kebun yang diusahakan sebagai pekerjaan sampingan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

kehidupan masyarakat di dalam kawasan HPT Bukit Badas sangat tergantung dengan lahan yang ada.

Sebaran penduduk masyarakat desa-desa di lokasi penelitian dalam kawasan HPT Bukit Badas berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk berdasar Tingkat Pendidikan

No.	Kriteria	Desa/Dusun			
		Sekalak	Lubuk Resam	Talang Empat	Sinar Pagi
1.	Tidak/belum tamat SD	378	475	211	344
2	SD	130	254	204	256
3	SLTP	68	78	80	56
4	SLTA	34	67	20	78
5.	PT	3	5	5	1
Jumlah		613	879	567	735

Sumber : Profil Desa dan Hasil Wawancara, 2009

Dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa-desa dalam kawasan HPT Bukit Badas relatif masih rendah. Hampir separuh jumlah penduduk belum tamat SD (49%) dan sepertiganya Tamat SD (31.3%). Penduduk yang belum tamat SD selain anak-anak yang masih belum sekolah dan masih belajar di tingkat SD juga terdiri dari orang dewasa yang memang pada saat usia pendidikan di desanya belum tersedia fasilitas pendidikan.

Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini perlu mendapatkan perhatian karena akan mempengaruhi tingkat kemampuan manusia dalam menerima

inovasi baru dan mempengaruhi pola seseorang dalam bersikap. Pendidikan hanya dapat meningkatkan pengetahuan namun juga dapat meningkatkan ketrampilan/keahlian tenaga kerja, sehingga meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan dapat meningkatkan penghasilan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana publik di desa-desa di dalam kawasan HPT Bukit Badas dan kondisinya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 . Sarana dan Prasarana di Desa dalam Kawasan HPT Bukit Badas

No.	Jenis Prasarana	Desa/Dusun							
		Sekalak		Lubuk Resam		Talang Empat		Sinar Pagi	
		Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi
1.	Kantor Desa/Dusun	1	baik	1	Baik	-	-	-	-
2.	Jalan	1	tanah	1	Aspal	1	aspal	1	tanah
3.	Sekolah a. SD b. SMP	1 -	Baik -	2 1	Baik Baik	1 -	Baik -	-	-
4.	Pasar	1	Selasa	1	Kamis	1	Kamis	-	-
5.	Tempat Ibadah a. Masjid b. Musholla	1	Baik	2	Baik	1 1	Baik Baik	2	Baik
6.	Puskesmas	1	Aktif	1	Aktif	-	-	-	-

Sumber : Hasil Penelitian, 2009.

Dari tabel di atas tampak bahwa aksesabilitas keempat desa/dusun sudah terjangkau, walaupun untuk Desa Sekalak dan Dusun Sinar Pagi masih relatif terbatas karena kondisi jalan tanah yang ada sudah lama tidak terawat sehingga pada musim penghujan sulit untuk dilalui, bahkan untuk Dusun Sinar Pagi masyarakat lebih suka memintas jalur dengan jalan setapak melalui Desa Lubuk Resam karena jaraknya lebih dekat.

Dalam proses pengenalan inovasi baru diperlukan sarana institusi atau

organisasi yang sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Keberadaan organisasi atau institusi yang telah ada ditengah masyarakat mencerminkan telah terjadinya komunikasi dan interaksi antar warga, dan dapat dijadikan simbol adanya keteraturan dalam komunitas yang ada. Adanya organisasi atau lembaga di desa akan sangat bermanfaat sebagai sarana untuk mentransformasikan ide ataupun menjalin komunikasi yang baik. Beberapa organisasi yang ada di desa-dusun di dalam kawasan HPT Bukit Badas dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7. Kelompok Organisasi Masyarakat di desa/dusun dalam Kawasan HPT Bukit Badas

No	Jenis Organisasi/ kelembagaan	Desa/Dusun							
		Sekalak		Lubuk Resam		Talang Empat		Sinar Pagi	
		Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi	Jml	Kondisi
1.	BPD	1	aktif	1	aktif	-	-	-	-
2.	Kelompok Pengajian	1	aktif	1	aktif	1	aktif	1	aktif
3.	Kelompok Tani	4	aktif	2	aktif	2	aktif	-	-
4.	Kelompok Adat	1	aktif	-	-	-	-	-	-
5.	Arisan	-	-	1	aktif	2	aktif	10	aktif
6.	Karang taruna	1	Non aktif	-	-	-	-	-	-
7.	Risma	1	aktif	1	aktif	-	-	-	-

Sumber : Hasil Penelitian, 2009

Sebagai desa/dusun yang awalnya terisolir, penduduk desa sekitar hutan umumnya lebih mengandalkan pemilikan lahan dalam mencukupi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebun kopi dan sawah merupakan lahan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di dalam kawasan HPT Bukit Badas. Rata-rata pemilikan lahan yang sedang digarap di Desa Lubuk Resam adalah 1,62 Ha/KK, yang terdiri dari lahan sawah seluas 0,42 Ha/KK dan kebun kopi seluas. 1,2

Ha/KK. Sebagian besar masyarakat di desa tersebut memiliki lahan sawah dan lahan kebun kopi. Pemilikan lahan sawah lebih sempit dibandingkan dengan lahan kebun kopi karena lahan sawah umumnya berupa lembah datar yang merupakan cekungan diantara perbukitan. Hanya 4 responden (16,7%) yang tidak mempunyai lahan sawah di Desa Lubuk Resam. Pemilikan lahan yang sedang digarap responden di lokasi penelitian tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 8. Luas Pemilikan Lahan yang sedang Digarap Responden di Lokasi Penelitian

No.	Pemilikan Lahan (Ha)	Jumlah Responden	Prosentase
1.	< 2	14	58,33
2.	> 2	10	41,67
Jumlah		24	100,00

Sumber : Siswahyono, 2006

Hasil usaha tani buah kopi dan padi sawah merupakan komoditas utama sumber penghasilan bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan HPT Bukit Badas. Budidaya tanaman kopi mendominasi lahan kering yang dimiliki oleh masyarakat di dalam kawasan hutan tersebut. Kemudahan dalam budidaya tanaman kopi, menjadikan masyarakat mempertahankan budidaya tanaman ini hingga sekarang. Lahan yang subur diperlukan untuk budidaya tanaman kopi, mengingat masyarakat tidak melakukan pemupukan. Oleh karena itu lahan yang

bervegetasi tua (*belukar tuo-rimbo*) sangat baik untuk budidaya tanaman ini.

Adanya keterbatasan lahan yang bervegetasi tua (*belukar tuo*) di wilayah desa, menyebabkan sebagian masyarakat mulai beralih ke jenis tanaman keras lainnya. Karet merupakan jenis tanaman yang dipilih untuk menggantikan tanaman kopi yang sudah tua/rusak sehingga kurang produktif. Namun akhir-akhir ini berkembang tanaman sawit yang dibudidayakan masyarakat. Tanaman Karet maupun Sawit merupakan jenis tanaman yang relatif baru dibudidayakan masyarakat di lokasi penelitian.

Disamping lahan kering, masyarakat juga memiliki lahan sawah yang umumnya berada di dekat dengan pemukimannya. Hasil sawah berupa padi merupakan bahan pangan utama bagi masyarakat di dalam kawasan HPT Bukit Badas. Ketersediaan bahan pangan sangat penting bagi masyarakat di lokasi penelitian, mengingat lokasi desa/dusun dalam kawasan HPT Bukit Badas awalnya masih terisolir dan sulit dijangkau. Adanya lahan sawah menjadikan pemukiman “talang” dapat berkembang menjadi desa/dusun. Umumnya hasil panen padi tidak diperjualbelikan. Masyarakat hanya menjual hasil panen kopi untuk memenuhi kebutuhan selain pangan seperti sandang, pendidikan, sosial dan bahan pangan lain yang tidak

tersedia di desa seperti lauk pauk, bumbu masak dan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan responden, harga kopi di lokasi penelitian relatif tinggi selama 3 tahun terakhir ini yaitu Rp 10.000,-/Kg - Rp 12.000,-/Kg dan harga tersebut relatif stabil. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya Rp 4.000,-/kg – Rp 6.000,-/kg. Disamping harga kopi yang tinggi, adanya prasarana jalan aspal menuju ke Desa Lubuk Resam, menjadikan harga angkut komoditas pertanian lebih rendah. Setiap satuan beratnya, sehingga harga komoditas kopi tersebut bisa lebih dinikmati petani. Penghasilan kotor responden yang berasal dari lahan usaha tani yang sedang digarap tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 9. Penghasilan Responden di Lokasi Penelitian

No.	Penghasilan (Rp/KK)	Jumlah Responden	Prosentase
1.	< 10.000.000	8	33,33
2.	10.000.000 – 15.000.000	6	25,00
3.	> 15.000.000	10	41,67
Jumlah		25	100,00

Sumber : Siswahyono (2006) yang diolah

Responden yang mempunyai penghasilan kotor dari lahan usaha taninya kurang dari Rp 10.000.000,00/tahun adalah responden yang berusia tergolong muda dan hanya mempunyai lahan kebun kopi. Produktivitas lahan yang masih tergolong rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya penghasilan kotor responden dibandingkan dengan lahan usaha tani yang mereka garap.. Rata-rata produksi kopi yang dihasilkan lahan kebun di Desa Lubuk Resam adalah 394,23 kg/ha/tahun dan rata-rata produksi beras yang dihasilkan dari lahan sawahnya sebesar 1.045,75 kg/ha/musim atau 2.091,5 Kg/Ha/Tahun..

Budidaya tanaman baik kopi maupun padi yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk Resam hanya mengandalkan kesuburan alami lahan. Dipihak lain, bertambahnya waktu dalam budidaya tanaman tersebut juga menyebabkan tingkat kesuburan yang

menurun. Oleh karena itu, pendekatan teknologi harus diimplementasikan dalam upaya peningkatan produksi usaha tani di desa tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Desa/dusun dalam kawasan HPT Bukit Badas telah ada sejak jaman penjajahan Pemerintahan Belanda, yang awal berdirinya merupakan permukiman talang. Saat ini, Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam sudah menjadi desa definitive, sedangkan Dusun Sinar Pagi dan Dusun Talang Empat sedang dalam tahap persiapan pemekaran dari wilayah Desa Puguk.

2. Masyarakat desa/dusun dalam kawasan HPT Bukit Badas umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani (90%) dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah dan rata-rata mempunyai lahan usaha tani yang digarap berupa sawah seluas 0,42 Ha/KK dan lahan kebun kopi seluas 1,2 Ha/KK.

SARAN

Peneliti menyadari adanya keterbatasan sumber informasi terutama dokumen-dokumen sejarah saat penjajahan Inggris maupun Belanda di Bengkulu. Oleh karenanya diperlukan kajian lebih lanjut tentang pengelolaan hutan oleh Belanda atau Inggris saat itu. Tak kalah pentingnya informasi tentang proses pengukuhan kawasan HPT Bukit Badas oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia sendiri juga perlu dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. Pengembalian Alih Fungsi Tata Guna Hutan Kesepakatan/Hutan Produksi Terbatas Menjadi Hutan Rakyat/Ulayat Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Seluma. Pemerintah Kabupaten Seluma.
- Anonim. 2001. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Hutan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim.1999. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 Hektar. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim.1998. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bengkulu Nomor :305 Tahun 1998 Tentang Hasil Pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.
- Anonim. 1990. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Dali, B. 2008. Kabupaten Seluma dalam Problema Masyarakat Desa Pedalaman. Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma.
- Hendarti, L. *et al.* 2009. Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekolog Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (Kasus di Kawasan Ekosistem Halimun). <http://puslitsosekhut.web.id/publikasi.php?id=243> (diakses tanggal 10 Agustus 2010)
- Masykuri et al. 1990. Peta Sejarah Propinsi Bengkulu. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Nurjaya, I.N. 2005. Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia. Jurnal Jurisprudence Volume 2 No.1 Edisi Maret 2005. <http://eprint.ums.ac.id/view/publication/s/Jurisprudence/vol=2E2/No=2E1.html> (diakses tanggal 8 september 2010).
- Setyanto, A. 2001. Elite Pribumi Bengkulu : Perspektif Sejarah Abad ke-19. Balai Pustaka. Jakarta
- Siswahyono. 2006. Studi Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis Masyarakat. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Verbist, B. dan Pasya, G. 2004. Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik dan Negosiasi di Sumber Jaya, lampung Barat - Propinsi lampung.

Jurnal Agrivita Volume 26 No.1.

Fakultas Pertanian Universitas

Lampung.

<http://www.worldagroforestry.org/sea/>

[publication/files/journal/JA0017-](http://publication/files/journal/JA0017-04.PDF)

[04.PDF](http://publication/files/journal/JA0017-04.PDF) (diakses tanggal 10 Agustus

2010)